

**MASALAH PELIMPAHAN WEWENANG PRESIDEN KEPADA WAKIL
PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL**

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum***

Disusun Oleh :

MUHAMMAD ICHSAN

NIM. 1410112015


Dibawah Bimbingan:

- 1. H. Ilhamdi Taufik, S. H., M. H.**
- 2. Feri Amsari, S. H., M. H., LL.M.**

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

	No. Alumni Universitas	Muhammad Ichsan	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir : Padang, 10 Mei 1996 b) Nama Orang Tua : Misnawati Rully Fitri c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Tata Negara e) BP : 1410112015	f) Tanggal Lulus : 14 Januari 2019 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,34 i) Lama Studi : 4 Tahun 5 Bulan j) Alamat : Komplek Taman Graha Indah Lestari No.15A, Lapai, Padang.	

MASALAH PELIMPAHAN WEWENANG PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL

(Muhammad Ichsan, 1410112015, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V (Hukum Tata Negara), 68 Halaman, 2019)

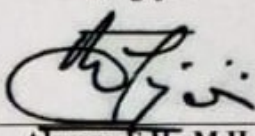
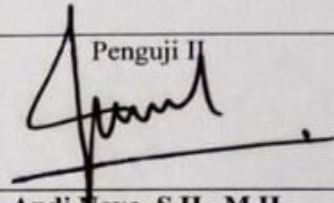
ABSTRAK

Wakil Presiden merupakan jabatan yang tidak dapat dipisahkan dengan Presiden didalam Sistem Presidensial. Meski dianggap sebagai kesatuan, pengaturan mengenai kewenangan Wakil Presiden tidak diatur secara jelas. Sehingga menyebabkan jabatan Wakil Presiden dianggap sebagai "ban serep" dan tidak diperhitungkan kedudukannya. Jabatan Wakil Presiden di negara yang menggunakan Sistem Presidensial tidak memiliki kesamaan. Pendekatan komparatif digunakan untuk melihat awal mula serta perkembangan Wakil Presiden di masing-masing negara sehingga terlihat ciri khas Wakil Presiden di masing-masing negara. Kewenangan Wakil Presiden bergantung atas pelimpahan dari Presiden. Keadaan ini tidak menyebabkan Wakil Presiden dapat secara maksimal membantu Presiden. Pelimpahan wewenang ini memiliki beberapa kendala yang berakibat pada disharmoni hubungan diantara Presiden dan Wakil Presiden. Akibat dari disharmonisasi tersebut kedudukan Wakil Presiden menjadi terancam dan hanya menjadi pelengkap di dalam Sistem Presidensial. Untuk itu, perlu diatur mengenai ketentuan hukum mengenai pelimpahan wewenang kepada Wakil Presiden yang mengatur secara jelas kondisi berhalangan sementara Presiden dan pertanggungjawaban Wakil Presiden. Sehingga dapat memunculkan Presiden dan Wakil Presiden yang dapat saling bekerja sama serta menguatkan posisi Wakil Presiden sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif.

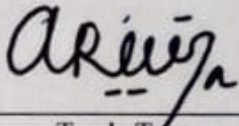
Kata Kunci: Wewenang, Wakil Presiden, Sistem Presidensial.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Januari 2019. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

TandaTangan	Penguji I	Penguji II
		
NamaTerang	Alysam, S.H., M.H.	Andi Nova, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara : **Arfiani, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: